

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemindahan dan peralihan wilayah tentunya dapat ditemui di berbagai wilayah, terutama wilayah yang berada di bawah kekuasaan kerajaan kemudian diambil alih oleh pemerintahan kolonial. Terbentuknya Kabupaten Blitar merupakan wilayah peralihan dari Kabupaten Srengat. Pasca Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 antara Pangeran Mangkubumi dan Pangeran mangkunegara dengan Sunan Pakubuoono III membagi wilayah menjadi dua yaitu wilayah mancanegara timur Surakarta dan Yogyakarta.¹ seperti dalam Babad Giyanti dalam penelitian karya Wulan Dari menyebutkan wilayah mancanegara Yogyakarta adalah Madiun, Magetan, Curuban, Separuh Pacitan, Kertasana, Kalangbret, Ngrawa (Tulungagung), Japan (Majakerta), Jipang (Bojonegoro), Teran Karas (Ngawen), Sela, Warung (Kuwu Wirasari) dan Grobogan, sementara wilayah mancanegara Surakarta adalah Jagaraga, Separuh Pacitan, Kediri, Blitar (Srengat dan Lodaya), Pace (Nganjuk, Brebek), Wirasaba (Maga Agung), Blora, Banyumas, dan Keduwang.²

Setelah peristiwa Perjanjian Giyanti, pada tahun 1825 terjadi Perang Jawa dengan tokoh Pangeran Diponegoro yang menolak kolonialisasi dan

¹ Sri Wintala Achmad, Babad Giyanti Pilihan Nagari Dan Perjanjian Salatiga (Yogyakarta: Araska, 2016).

² Wulan Dari, Ira Pramudawardhani, and Andriyanto Andriyanto, *Perjuangan Dan Kegigihan Nyai Ageng Serang Dalam Perang Diponegoro Tahun 1825-1830*, *Keraton: Journal of History Education and Culture*, 3.2 (2022).

melawan Pemerintah Kolonial.³ Pada akhir 1830 Pangeran Diponegoro ditangkap oleh pemerintah Belanda dan diantara pengikut Pangeran Diponegoro melakukan perpindahan tempat untuk menyelamatkan diri. Pada tahun yang sama, keluarlah dekrit oleh Raja Willem I untuk membentuk pasukan *Koninklijke Mareschaussee (mersose)* yang bertujuan untuk menangkap pengikut Diponegoro karena dikhawatirkan hendak melakukan penyerangan terhadap Pemerintah Belanda.⁴ Berawal dari pembentukan *Koninklijke Mareschaussee (mersose)* para pengikut Diponegoro berlarian dan mencari persembunyian ke berbagai wilayah agar terhindar dari kejaran pasukan Belanda, beberapa diantaranya sampai di sekitar Blitar, Kediri, Malang, dan sekitarnya.⁵

Wilayah Srengat dan Blitar selain menjadi wilayah mancanegara Kasunanan Surakarta, juga menjadi salah satu wilayah tujuan tempat tinggal pelarian pengikut pangeran Diponegoro. Srengat dan Blitar dipilih sebagai tujuan untuk menyelamatkan diri oleh pengikut pangeran Diponegoro dari pasukan kolonial Belanda karena ada beberapa pertimbangan yaitu: *pertama*, Srengat dan Blitar mempunyai kondisi wilayah yang mirip dengan wilayah asalnya yaitu sekitar lereng Gunung Merapi dan lereng Gunung Merbabu, sedangkan wilayah Srengat dan Blitar terdapat pada sekitar

³ Vira Maulisa Dewi, 'Pangeran Diponegoro Dalam Perang Jawa 1825-1830', SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Kajian Sejarah, 2.2 (2020), 147–58 .

⁴ Nurul Laelatul Husna and Hendra Afiyanto, *Pengislaman Blitar Oleh Laskar Diponegoro Dari Pra Hingga Pasca Perang Jawa 1820-1830*, Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam, (2022) Vol. 12 No. 2.

⁵ Husna and Afiyanto.

Gunung Kelud dan Gunung Kawi yang memiliki struktur tanahnya subur sekaligus masih masuk ke dalam wilayah kekuasaan Kasunanan Surakarta. *Kedua*, Perjanjian Sepreh belum tersebar luas sehingga pemerintahan Belanda belum memperhatikan dan melakukan pengawasan yang intensif pada dua wilayah tersebut. *Ketiga*, Bupati Srengat R.Ng Mertokusumo mempunyai niat untuk melindungi pengikut Diponegoro dengan dalih ingin menunjukkan rasa hormatnya kepada Diponegoro.⁶ Hal ini membuktikan bahwa wilayah Srengat memiliki wilayah yang strategis dan memiliki pengaruh sebelum adanya nama kabupaten Blitar.

Pada tahun 1830 bersamaan dengan ditangkapnya Pangeran Diponegoro terdapat Perjanjian Sepreh antara tokoh kolonial Belanda yang dipimpin oleh Raad Van Indie, Mr. Pieter Markus, Rider Van de Orde Van de Nederlandsche leeuw, Commisaris Ter Regilling de Vorstenlanden dengan bupati wilayah mancanegara dari Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta di Pendopo Sepreh Ngawi.⁷ Perjanjian Sepreh menghasilkan wilayah yang semula dipimpin oleh bupati kemudian diambil alih kuasa dan wilayah mancanegara Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta diatur oleh pemerintah kolonial Belanda. Peristiwa berpindahanya pengikut Diponegoro juga melatarbelakangi adanya Perjanjian Sepreh yang mengakibatkan semua wilayah mancanegara harus tunduk dalam pemerintahan kolonial termasuk wilayah Srengat. Bupati

⁶ Husna and Afianto.

⁷ Indah Iriani, *Jejak-Jejak Penyebaran Islam Di Kota Blitar* (Blitar: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2020).

Srengat Mertokusumo membuktikan kesetiaannya kepada Pangeran Diponegoro dan melindungi pengikut Pangeran Diponegoro. Hal ini menjadikan posisi Srengat turut dibawah kabupaten, hingga pada tanggal 31 Desember 1830 terbentuklah *Regentschap* Blitar dankondisi Srengat semakin surut.⁸

Adanya kabupaten Srengat sebelum berpindah ke Kabupaten Blitar dapat dilihat dari salah satu desa yang terletak di Srengat adalah Desa Kauman yang menjadi ibu kota Kabupaten. Kauman menjadi nama desa yang dipakai di daerah kerajaan atau sekitar pusat kota. Wilayah Kauman identik dengan perkumpulan pemukiman warga yang agamis dan ulama.⁹ Wilayah Kauman menjadi tempat tinggal ulama dan abdi dalem sekaligus menjadi pengurus masjid pada masa kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Menurut bapak Widodo salah satu narasumber selaku sejarawan Kelurahan Kauman Srengat:¹⁰

“Terdapat juga Desa Purwokerto dan Desa Bagelenan yang merupakan wilayah konsentrasi penduduk yang bermigrasi dari kekalahan Perang Jawa. Nama-nama desa yang dibawa oleh pasukan Diponegoro di wilayah Srengat sama dengan nama desa di Jawa Tengah dan nama kauman sendiri merupakan nama yang universal di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.”

Kauman menjadi wilayah yang memiliki peran penting dalam perkembangan Kabupaten Srengat, tidak hanya wilayah Srengat yang

⁸ Paramita Oktarina, ‘Sejarah Terbentuknya Regentschap Blitar (1830-1885)’ (Universitas Negeri Malang, 2013).

⁹ Wiwik Setyaningsih, *Potensi Spasial Fisik Kampung Kauman Surakarta Sebagai Kawasan Budaya Dan Religi*, *GEMA TEKNIK Majalah Ilmiah Teknik*, 2009, Vol. 10 No. 2.

¹⁰ Insanu Widodo, *Wawancara Sejarah Kabupaten Srengat* (Srengat, 8 Maret 2023).

memiliki nama Kauman, di Surakarta nama Kauman juga menjadi wilayah pusat kota, Kauman menjadi tempat yang memiliki kekayaan budaya dan sakral, memiliki nilai kesejarahan yang masih asli dan memiliki nilai tata cara hidup. Keistimewaan lain Kauman menjadi tempat tinggal kaum ulama dan abdi dalem Kerajaan.¹¹ Dapat disimpulkan bahwa, keterkaitan antara nama wilayah juga disebabkan oleh berpindahnya pengikut Diponegoro ke daerah baru yang ditempati.

Kauman menjadi pusat kota pemerintahan Kabupaten Srengat lengkap dengan tata letak kota, seperti alun-alun, pendopo kabupaten, masjid, dan penjara. Seiring dengan peralihan menuju Kabupaten Blitar wilayah Srengat mulai surut, karena Perjanjian Sepreh Srengat turun kedudukan yang semula menjadi kabupaten berubah menjadi kawedanan dan semua berpusat di wilayah Blitar yang bertempat di Desa Pakunden. Pada tahun 1863 diangkatlah bupati pertama Kabupaten Blitar yaitu Bupati Ronggo Hadinegara sebagai bupati Blitar pada tanggal 1 April 1863.¹² Pada masa kepemimpinan Bupati Ronggo Hadinegara, pusat pemerintahan yang semula berada di Kelurahan Pakunden dipindahkan ke utara alun-alun kota Blitar sekarang karena wilayah pakunden merupakan wilayah terdampak banjir lahar dari letusan Gunung Kelud.

Melihat dari pemaparan di atas, perpindahan kekuasaan baik wilayah dan pemerintahan tidak terlepas dari sistem kolonialisasi dari

¹¹ Setyaningsih.

¹² Heather Sutherland, 'Notes on Java's Regent Families: Part I', *Indonesia*, 16 (1973), 112 <<https://www.jstor.org/stable/3350649>> [diakses pada 20 Maret 2024].

pemerintah kolonial Belanda. Kebijakan yang diperoleh dari perjanjian bersama sebenarnya lebih menguntungkan pihak Belanda. Semua wilayah yang telah menjadi bagian administrasi bentukan Belanda harus tunduk dalam kebijakan yang telah ditetapkan penguasa, termasuk Srengat menjadi salah satu wilayah yang memiliki pengaruh dalam pembentukan Kabupaten Blitar saat ini. Penelitian ini membahas mengenai peristiwa sebelum dan sesudah Perjanjian Sepreh dengan memaparkan bahwa wilayah Srengat dulunya merupakan wilayah kabupaten dan berpindah ke Blitar hingga penetapan bupati Blitar pertama. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul *"Peralihan Pemerintahan dari Kabupaten Srengat ke Kabupaten Blitar 1830-1863"*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi pemerintahan Kabupaten Srengat sebelum berpindah ke Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana proses perpindahan Kabupaten Srengat ke Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana kondisi pemerintahan yang ada di Kabupaten Srengat.

2. Mengetahui peristiwa yang terjadi di wilayah Srengat sampai berpindahnya pusat administrasi pemerintahan dari Kabupaten Srengat ke Kabupaten Blitar.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan terkait Kabupaten Srengat memberikan informasi mengenai sejarah dan berpindahnya pusat pemerintahan dari Kabupaten Srengat ke Kabupaten Blitar. Adapun beberapa manfaat penelitian adalah *pertama*, mendukung penulisan sejarah lokal yang ada di Kecamatan Srengat, sehingga akan menambah pengetahuan dan wawasan terkait sejarah yang ada di kecamatan Srengat. *Kedua*, akan memberikan tambahan koleksi bacaan dan referensi terkait sejarah kecamatan Srengat dan perpindahan Kabupaten Srengat ke Kabupaten Blitar. *Ketiga*, penelitian ini akan memberikan data tulis baik dalam lingkup pemerintahan juga dalam lingkup pendidikan. *Keempat*, adanya penulisan ini akan tetap menjaga kesinambungan antara masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Informasi yang telah tertulis akan menjadi bukti bahwa peristiwa masa lalu benar-benar ada.

E. Metode Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, karena dalam penulisan ini memaparkan mengenai sejarah terbentuknya Kabupaten Blitar pada tahun 1863 yang berawal dari Kabupaten Srengat. Metode penelitian sejarah merupakan sebuah proses dan menganalisis secara kritis mengenai peristiwa yang terjadi di masa lalu. Metode penelitian

sejarah digunakan sebagai proses penelitian pada sumber masa lalu yang kemudian secara kritis-analitis dan sistematis disusun menjadi tulisan sejarah.¹³ Adapun metode penelitian sejarah yang digunakan penulis adalah pengumpulan sumber (heuristik), verifikasi (kritik sejarah), interpretasi dan penulisan (historiografi).¹⁴ *Pertama*, metode pengumpulan sumber (heuristik), yaitu kegiatan mencari informasi dari berbagai sumber dan media agar mendapatkan data atau materi sejarah atau evidensi sejarah.¹⁵ Metode heuristik disebut sebagai tahap pencarian sumber keterangan atau pencarian bukti dalam semua penulisan sejarah. Metode heuristik menjadi langkah awal dan menjadi aktivitas mencari, menemukan dan mengumpulkan sumber yang dapat dijadikan sebagai bahan memasuki tahap selanjutnya.¹⁶

Adapun sumber yang dikumpulkan dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan bukti tertulis dari peristiwa pertama atau sezaman dengan peristiwa,¹⁷ namun dalam pengumpulan data tidak semua diperoleh berasal dari tempat kejadian peristiwa. Penulis kemudian menambah dengan memastikan keakurasian sumber primer dengan sumber sekunder, sehingga penulis menggunakan sumber sekunder yang sudah menjadi kajian dari buku, instansi

¹³ Komar Faridi, *Dinamika Kerajaan Mataram Islam Pasca Perjanjian Giyanti Tahun 1755-1830*, 2017.

¹⁴ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018).

¹⁵ Joko Sayono, 'Langkah-Langkah Heuristik Dalam Metode Sejarah Di Era Digital', *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 15.2 (2021).

¹⁶ Sayono.

¹⁷ Komar Faridi.

pemerintahan dan tulisan sebelumnya. Adapun sumber primer yang didapat adalah adanya pembagian Residen dan penguasanya dalam *Almanak Nederlandsch Indie* Tahun 1832,¹⁸ penetapan bupati Blitar pertama tahun 1863 dalam Besluit tanggal 1 April 1863 No. 10,¹⁹ kemudian adanya pembagian wilayah Residen Kediri pada *Statsblad Van Nederlandsch-Indie* No. 145 tahun 1874,²⁰ sedangkan dalam mendapatkan sumber sekunder, penulis mendapatkan catatan tahun pengangkatan Bupati blitar pertama sampai keenam pada karya Heater Sutherland,²¹ kemudian buku dengan judul *Jejak-jejak Penyebaran Islam di Kota Blitar* karya Indah Iriani yang diterbitkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar.²²

Kedua, tahap verifikasi (kritik sejarah), verifikasi dapat dikatakan sebagai metode kritis untuk menguji sumber mengenai keaslian otentisitas dan keabsahan kredibilitas. Kapan sumber dibuat? Dimana sumber dibuat? Siapa yang membuat? Dari bahan apa sumber dibuat? Apakah sumber dalam bentuk asli?.²³ Kesaksian sejarah juga merupakan faktor dalam menentukan sah dan tidaknya bukti atau fakta sejarah. Sumber yang didapat akan melalui kritik sumber yang dibedakan menjadi dua, yaitu

¹⁸ ‘Almanak van Nederlandsch-Indië Voor Het Jaar 1832’ <<https://books.google.co.id/books?id=5VJVAAAACAAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>> [diakses pada 7 Januari 2024].

¹⁹ Besluit 1 April 1863 No. 10 (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar).

²⁰ ‘Statsblad Van Nederlandsch-Indie No. 145’, 2019 <<https://bphn.jdihn.go.id/common/dokumen/1874STBL145.pdf>> [diakses pada 23 Januari 2024].

²¹ Heather Sutherland.

²² Indah Iriani.

²³ Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Penerbit Ombak: 2011) hlm. 105-107.

kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal merupakan kritik atau penilaian yang mengacu kepada isi dari sumber yang telah di dapat,²⁴ sedangkan kritik eksternal lebih mengarah kepada aspek luar sumber, seperti keotentikan sumber, kebenaran karya atau barang peninggalan yang berasal dari pemilik langsung atau pembuatnya.²⁵ Menurut Gilbert J. Garraghan, kekeliruan saksi pada umumnya ditimbulkan dari kekeliruan dalam sumber informal yang terjadi dalam usaha menjelaskan, menginterpretasikan, atau menarik kesimpulan dari sesuatu sumber itu, kemudian kekeliruan dalam sumber formal yang sengaja pada mulanya penuh kepercayaan, detail kesaksian tidak dipercaya, tidak mampu menyampaikan sesuai secara baik dan jujur.²⁶ Dalam melakukan kritik terhadap sumber yang ditemukan potongan gambar urutan bupati Srengat di bawah Residen Kediri. Potongan gambar urutan bupati ini tidak dapat dijadikan sebagai sumber karena tidak diketahui dari mana asal sumber didapat. Diperlukan adanya pencarian kembali dari mana potongan gambar urutan bupati didapat, hingga ditemukan potongan gambar terdapat dalam *Almanak Nederlandsch Indie* Tahun 1832.

Ketiga interpretasi, setelah dilakukan verifikasi sumber maka langkah selanjutnya yang akan digunakan dalam penelitian adalah interpretasi. Pada tahap interpretasi sebelum melakukan penulisan, dilakukan tahap penafsiran terhadap sumber yang telah di dapatkan setelah

²⁴ Komar Faridi.

²⁵ Komar Faridi.

²⁶ Abdurahman.

melakukan kritik pada sumber yang didapatkan.²⁷ Tidak jarang sumber atau data yang di dapatkan dapat dengan mudah untuk dipahami. Terdapat penggunaan bahasa asing yang perlu dilakukan penerjemahan dan pemaknaan dengan cara membandingkan dengan sumber lain. Perlu diketahui bahwa tidak semua data atau sumber yang diperoleh menggunakan Bahasa Indonesia dan mudah untuk dipahami.

Pada masa kependudukan pemerintah Belanda, adanya berbagai kebijakan tertulis seperti *Almanak* dan *Statsblad*. Seperti penemuan yang telah ditemukan, dalam penulisan *Almanak* dan *Statsblad* menggunakan Bahasa Belanda. Dengan demikian maka perlu dilakukan penafsiran agar mudah untuk difahami dan memperoleh fakta yang nantinya akan digunakan dalam penulisan sejarah bukan hanya sekedar kronologis belaka yang kurang memiliki makna²⁸ sumber lain yang kiranya perlu untuk ditafsirkan atau penjelasan adalah singkatan dan penggunaan bahasa kuno seperti R.T.A. Adhinegoro atau Raden Tumenggung Aryo Adhinegoro, kemudian R.Ng Mertokusumo atau Raden Ngabehi Mertokusumo. Kuntowijoyo berpendapat bahwa seorang sejarawan harus dapat membayangkan apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi sesudahnya.²⁹ Hal ini dilakukan dengan merangkai kronologi data atau sumber peristiwa yang nantinya akan diperoleh cerita sejarah secara realistis dan logis.

²⁷ Wulan Juliani Sukmana, 'Metode Penelitian Sejarah', *Seri Publikasi Pembelajaran*, 1.2 (2021), 1-4.

²⁸ Komar Faridi.

²⁹ Sukmana.

Keempat, penulisan sejarah (historiografi), merupakan tahap akhir untuk memaparkan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Historiografi memberikan jelas gambaran mengenai proses penelitian sejak awal sampai pada tahap kesimpulan.³⁰ Fakta fakta yang telah di dapatkan oleh penulis menjadi bagian dalam tahap ini. Hasil laporan terdahulu akan memberikan gambaran penulis mengenai peristiwa yang akan dituliskan. Dalam penyajian penelitian terdapat tiga bagian yaitu: pengantar, hasil penelitian dan simpulan.³¹ Pada bagian pengantar berisi latar belakang permasalahan, pertanyaan yang akan dijawab pada saat penelitian, teori dan konsep penelitian, dan sumber sejarah. Dalam hasil penelitian akan menunjukkan profesionalisme penulis dalam pertanggungjawaban penulisan yang terletak dalam catatan lampiran. Karena semua kebenaran yang ditulis oleh penulis akan didukung dengan data yang telah didapatkan. Terakhir adalah simpulan yang berisi *generalization* hasil tulisan yang telah ditulis oleh penulis pada bab sebelumnya dan *social significance* penelitian penulis

³⁰ Abdurahman.

³¹ Kuntowijoyo.